

**BAB II**  
**KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS**

**A. Landasan Teori**

**1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

a. Pengertian APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (perda).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Abdul (2014: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kegiatan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Dari beberapa definisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Abdul (2014: 33) dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan diterapkan dengan peraturan daerah.

b. Unsur-unsur APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, unsur-unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Belanja Daerah, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
- 3) Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## **2. Pendapatan Daerah**

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang meliputi hak daerah.

Menurut Abdul (2014: 106) pendapatan daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Dari beberapa definisi tentang pendapatan daerah diatas menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Abdul (2014: 106) dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Unsur-Unsur Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, unsur-unsur pendapatan daerah antara lain :

- 1) Pendapatan asli daerah, meliputi :
  - a) Pajak daerah
  - b) Retribusi daerah
  - c) Hasil pengelolaah kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Pendapatan transfer, meliputi :
  - a) Dana bagi hasil
  - b) Dana alokasi umum
  - c) Dana alokasi khusus

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :
  - a) Hibah
  - b) Dana darurat
  - c) Dan lain-lain

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul (2014: 101) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Wempy (2017: 91) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.

Dari beberapa definisi tentang pendapatan asli daerah diatas menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Abdul Halim 2014: 101 dan Bangsa 2014: 91) dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Unsur-Unsur PAD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, unsur-unsur pendapatan asli daerah antara lain :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik Negara dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih mata uang rupiah terhadap

mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

#### **4. Dana Alokasi Umum**

##### **a. Pengertian Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Wempy (2017: 101) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Beberapa definisi tentang dana alokasi umum diatas menurut (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 dan bangsa 2014: 101) dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di

alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah atau kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan DAU sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) DAU atas dasar celah fiskal untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
- 2) Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
- 3) DAU atas dasar celah fiskal untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.
- 4) Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.
- 5) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- 6) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurang nilai celah fiskal.

- 7) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif sama atau lebih besar dari dana alokasi dasar tidak menerima DAU.

## **5. Dana Alokasi Khusus**

### **a. Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 Dana Alokasi Khusus adalah yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Undang-undang No 25 Tahun 1999 Pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum (DAU), dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAK) berdasarkan peraturan perundang-undangan No 104 Tahun 2000 meliputi :

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.



- 2) Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu membiayai pengoprasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 tahun.

Daerah yang ingin memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut :

- a) Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
- b) Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan.
- c) Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis atau instansi terkait.

## **6. Rasio Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Keuangan Pada APBD**

Menurut Abdul (2014: L3) Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan tersedia.

### **b. Manfaat Rasio Keuangan**

Menurut Abdul (2014: L2) Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Abdul (2014: L10) beberapa unsur-unsur rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2014: L5) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Menurut Mahmudi (2010: 142) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Menurut I Dewa Gde Bisma dan Hery (2010) tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dari pinjaman.

Dari beberapa definisi tentang rasio kemandirian keuangan daerah diatas menurut Abdul (2014: L5), Mahmudi (2010: 142) dan Bisma (2010: 77) dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah daerah dengan jumlah bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi

tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

## 2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan keuangan daerah dalam keuangan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian tinggi rasio efektivitas, menggambarkan keuangan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang baik rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisien yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima.

Kinerja pemerintah daerah melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efesiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan yang dikeluarkan untuk merealisasikan targetnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan.

### 3) Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel II.1**  
**Pola Hubungan Kemandirian**  
**dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-24	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

*Sumber : Halim, 2007*

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007: 169) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

- a) Pola hubungan intruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melakukan melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b) Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d) Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi

daerah. pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Reza (2013) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kausatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian dilakukan oleh Septyas (2014) yang berjudul pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, *tax effort* (upaya pajak), dan alokasi belanja modal di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, *tax effort* (upaya pajak), dan alokasi belanja modal di Jawa

Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum dampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan juga dana alokasi umum memiliki dampak negatif terhadap upaya pajak daerah. Kemudian, dana alokasi umum tidak memiliki dampak pada belanja modal.

Penelitian dilakukan oleh Ernawati dan Ikhsan Budi Riharjo (2017) yang berjudul pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Metode penelitian telah dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan realisasi anggaran dan belanja daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2015. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria (2016) yang berjudul factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota provinsi Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa secara simultan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil secara



simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial rasio efektivitas pendapatan daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Renny (2013) yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kota di Jawa Barat). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat kota di Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD kota di Jawa Barat tahun 2008-2010, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian oleh Nyoman dan Leny (2015) yang berjudul pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian, dkk (2016) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan asli daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2016) yang berjudul pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap negatif terhadap belanja modal, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian

keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

**Tabel II.2**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

<b>Nama Penelitian dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Reza(2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Di Sumatera Barat	Variabel yang sama yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbeda yaitu dana bagi hasil, serta objek penelitian yang berbeda yaitu Kabupaten dan Kota si Sumatera Barat
Sptyas (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, <i>tax effort</i> (Upaya Pajak), dan alokasi belanja modal di Jawa Timur	Variabel yang sama dana alokasi umum dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbera yaitu <i>tax effort</i> , alokasi belanja modal serta objek penelitian yang berbeda yaitu Jawa Timur
Emawati dan Ihksan Budi Riharjo (2017)	Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Variabel yang sama pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbeda yaitu belanja modal serta objek penelitian yang berbeda yaitu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Nurhasanah dan Maria (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu	Variabel yang sama tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbeda yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi serta penelitian yang berbeda yaitu Kabupaten Dan Kota Provinsi Bengkulu
Renny (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap	Variabel yang sama pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian	Variabel yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi serta objek penelitian yang berbeda yaitu kota di

	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)	keuangan daerah	Jawa Barat
Nyoman dan Leny (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung	Variabel yang sama pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbeda yaitu objek penelitian Kota Bandung
Dian dkk (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat)	Variabel yang sama dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbeda yaitu objek penelitian yaitu Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat
Anita (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel yang sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel yang berbeda yaitu belanja modal serta objek penelitian yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara

*Sumber : penulis 2018*

### **C. Kerangka Pemikiran**

#### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta

perkasa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU No. 23 Tahun 2014).

Menurut Abdul (2014: L5-L6) semakin besar pendapatan asli daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin rendah. Tingkat keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.

Pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

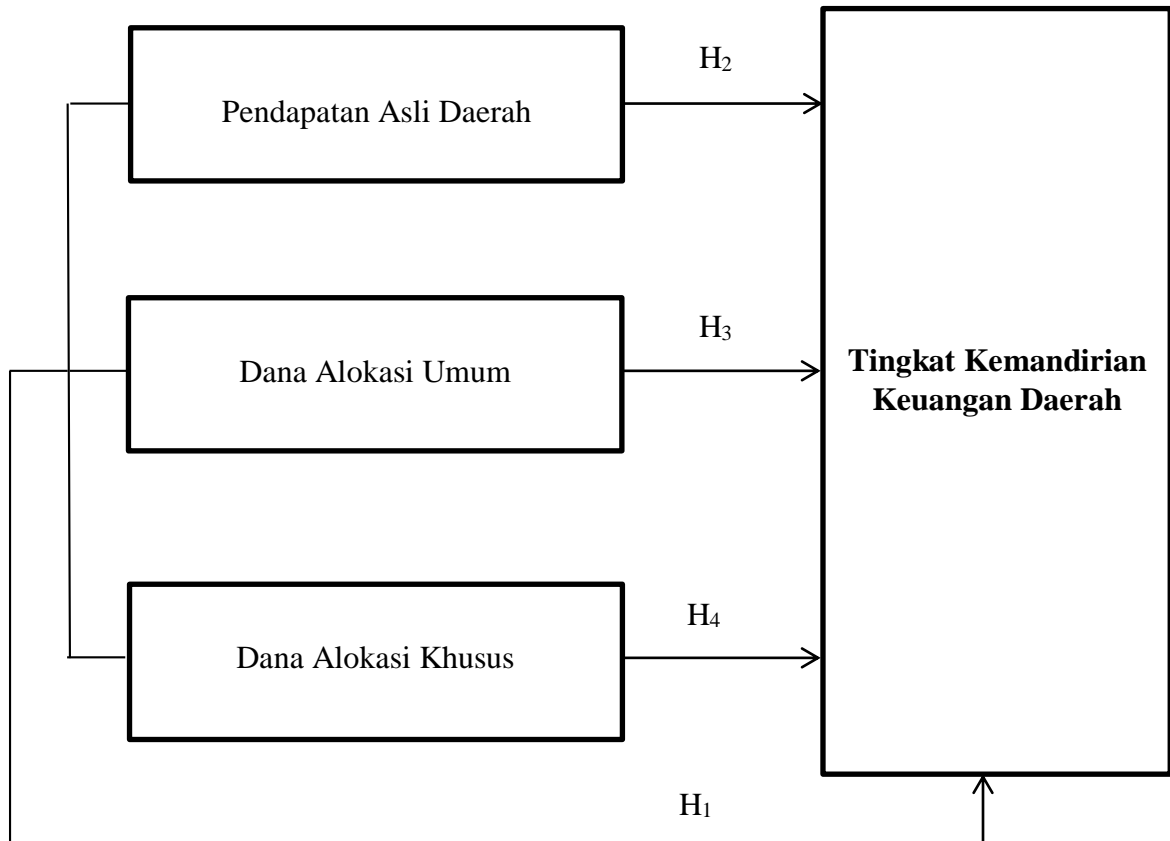
## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014)

Pada realitanya pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur sendiri rumah tangga daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah berupa dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Menurut Abdul (2014: L5-L6) Semakin besar dana alokasi umum maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya semakin kecil dana alokasi umum maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin tinggi, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin rendah.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis, 2019

Pada gambar II.1 diatas dapat dilihat dampak variabel bebas yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap variabel terkait yakni tingkat kemandirian keuangan daerah dalam hal ini pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat sehingga berdampak baik pada rasio kemandirian keuangan daerah.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut V. Wiratna (2015: 16) jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan eksplansinya yaitu :

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu

##### 2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan yang lain atau variabel satu dengan standar.

##### 3. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah provinsi Sumatera selatan.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Merdeka No. 8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

## C. Operasionalisasi Variabel

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>
Tingkat Kemandirian keuangan Daerah (Y)	Tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) dengan Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.	a. Total Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Dana Alokasi Umum (X2)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Total APBD yang bersumber dari DAU

Dana Alokasi Khusus (X3)	Dana Alokasi Khusus (DAU) adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional.	Jumlah APBD yang bersumber dari DAK
--------------------------	--	-------------------------------------

Sumber : Penulis, 2018

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

##### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (V.Wiratna, 2015: 65-80).

Jadi, populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun (2013-2017). Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.2**  
**Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

NO	Kabupaten/Kota
1	Kab. Lahat
2	Kab. Musi Banyuasin
3	Kab. Musi Rawas
4	Kab. Muara Enim
5	Kab. Ogan Komering Ilir
6	Kab. Ogan Komering Ulu
7	Kota Palembang
8	Kota Prabumulih
9	Kota Pagar Alam
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kab. Banyuasin
12	Kab. Ogan Ilir
13	Kab. Oku Timur
14	Kab. Oku Selatan
15	Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir
16	Kab. Empat Lawang
17	Kab. Musi Rawas Utara

*Sumber: Penulis, 2018*

### **E. Data yang diperlukan**

Menurut V. Wiratna (2015: 89) berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus dan panel, atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data langsung memberikan data pada pengumpulan data.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan

pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2017.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Menurut V. Wiratna (2015: 93-95) teknik pengumpulan data yang biasa digunakan, yaitu :

1. Tes

Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar maupun pencapaian atau prestasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

4. Kuesioner atau Angket (*Questionnaire*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

## 5. Survei

Survei lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan. Oleh karena itu survei tidak digunakan untuk menguji suatu hipotesis.

## 6. Analisis Dokumen

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrument ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumentasi berupa data laporan realisasi APBD yang di dapat melalui softcopy file, PAD, DAU, DAK, TFDP, Rasio Kemandirian.

## **G. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Menurut Albert (2014: 110-113) analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua jenis :

#### a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu analisis data yang dikelompokkan ke tabel-tabel frekuensi berdasarkan karakteristik dan dinyatakan dalam frekuensi persentase atau dapat juga dikemas lebih menarik secara visual dengan gambar.

## b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis yang berkaitan dengan angka, uji statistic, dan uji statistic tersebut disesuaikan dengan rumusan atau identifikasi yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan, formulasi regresi linier berganda :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Program SPSS sebagai alat untuk menguji data yang ada berupa Laporan Realisasi APBD dan kemudian hasil penelitian tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat kualitatif.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini teknik analisis yang digunakan yaitu :

### a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini ditunjukkan untuk memperoleh nilai yang tidak bias dan pengujian yang dapat dipercaya. Sebelum data diuji perlu diketahui apakah data melanggar asumsi dasar seperti multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier sederhana perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yaitu terdiri dari :

#### 1) Uji Normalitas

Menurut Albert (2014: 59) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengguna atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal *Kolmogorov smirnov* residual adalah sebagai berikut :

- (1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal.



- (2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak terdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berarti antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah Multikolinearitas. Apabila interpretasi ini dilanggar dengan terjadinya hubungan antar variabel bebas, maka tumbuhlah gejala yang disebut multikolinearitas. Dasar keputusan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas umumnya adalah dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0.1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi heteroskedastisitas. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penilaian menggunakan metode *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu :

- a) Jika nilai signifikansi antara variabel independen *dengan* absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### **4) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada prolem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan uji *Run Test*

- a) Jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- b) Jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelas.

#### **b. Analisis Regresi Linear Berganda**

Menurut Albert (2014: 194) Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y). Analisis digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

#### **c. Uji Hipotesis**

Menurut Imam (2016: 95) ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara

statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. perhitungan statistik disebutkan signifikan secara statistik apabila nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

### 1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Imam (2016: 95) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Sedangkan untuk data kurun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

### 2) Uji Signifikan Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji F)

Menurut Imam (2016: 96) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan bentuk pengujian sebagai berikut :

- a)  $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017.
- b)  $H_a$  : Terdapat pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017.

Kriteria pengambilan keputusan :

- a)  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
- b)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

### 3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas PAD, DAU, dan DAK secara parsial/individual terhadap variabel terikat tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bentuk pengujiannya adalah :

$H_{01}$  : Tidak terdapat pengaruh positif PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

- Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.
- Ho<sub>2</sub> : Tidak terdapat pengaruh positif DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.
- Ha<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.
- Ho<sub>3</sub> : Tidak terdapat pengaruh positif DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.
- Ha<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada awalnya bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No. 3 Palembang, Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).

Namun dengan berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka titik berat pembangunan diarahkan ke daerah dan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dimana arah pembangunan dititik beratkan di daerah, maka struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Sekarang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan). Dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas di gantinya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumater Selatan yang

berkantor di Jl. Merdeka No.8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Dengan di terbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama maka pada tahun 2012 Biro Keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah .

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional.”

### **b. Misi**

- 1) Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah.
- 2) Menciptakan pelayanan prima keuangan dan aset daera

### **3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan**

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

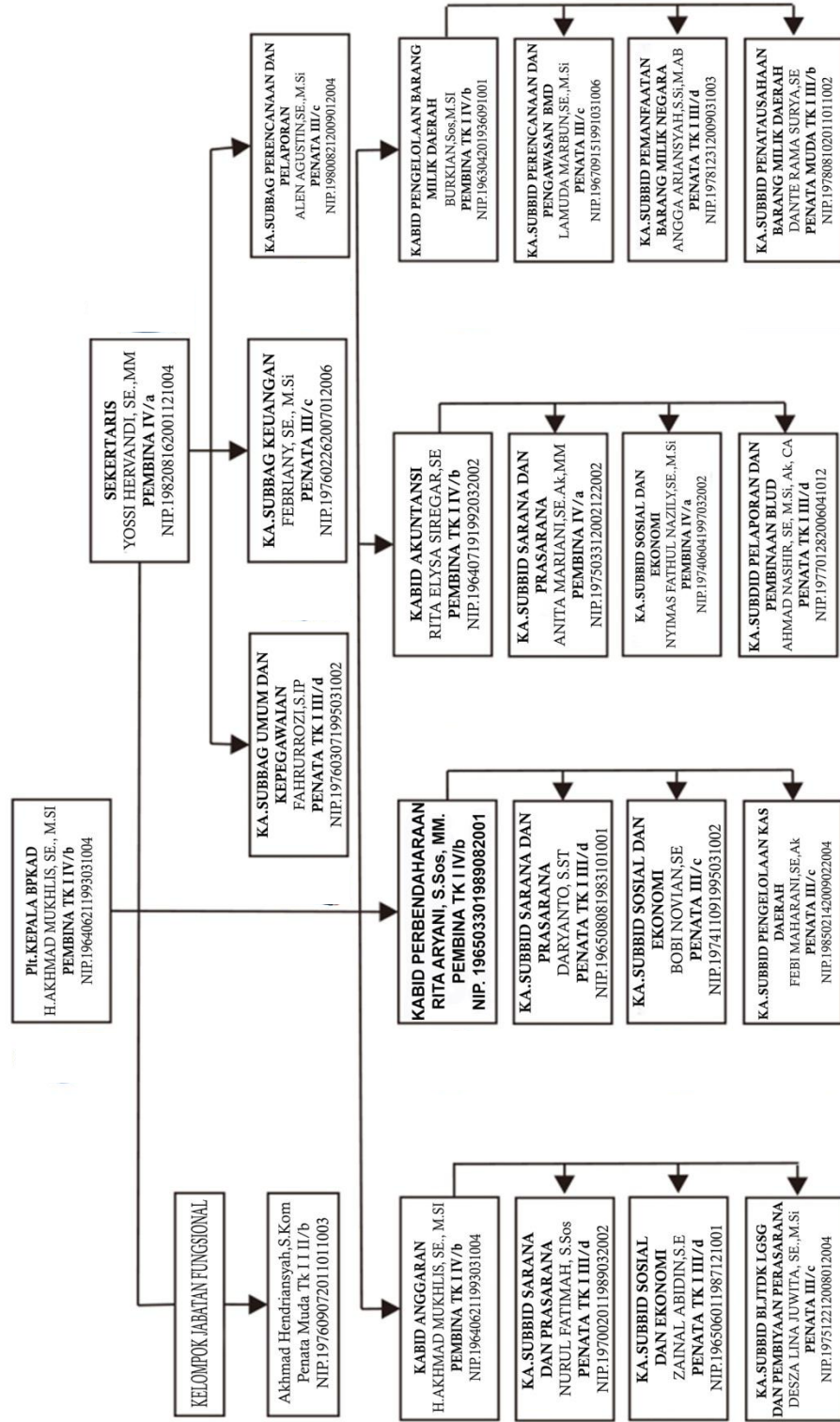
Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertical maupun horizontal.

Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Sehingga rencana kerjadapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Struktur organisasi



# STRUKTUR ORGANISASI BPKAD PROVINSI SUMATEREA SELATAN



#### **4. Uraian Tugas**

##### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 2) Pelaksanaan Anggaran SKPKD;
- 3) Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- 5) Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
- 6) Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
- 7) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
- 8) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
- 9) Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 10) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
- 11) Penggunaan barang milik daerah SKPKD;
- 12) Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah SKPKD;
- 13) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD;

- 14) Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan;
- 15) Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
- 16) Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD;
- 17) Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
- 18) Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Gubernur melalui pengelola;
- 19) Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan
- 20) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

**b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Rencana Perubahan Anggaran(RKPA);
- 2) Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA);
- 3) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;
- 4) Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar(SPM);
- 5) Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- 6) Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
- 7) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
- 8) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah;
- 10) Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 11) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
- 12) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD;

- 13) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;
- 14) Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
- 15) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tas penggunaan barang milik daerah SKPKD;
- 16) Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semseteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan(LBPT) SKPKD;
- 17) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 18) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- 19) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- 20) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- 21) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 22) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;  
dan
- 23) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan , mempunyai tugas:
  - a) Menyusun RKA/RKAP SKPKD;
  - b) Menyusun DPA/DPPA SKPKD;
  - c) Menyiapkan laporan kinerja;
  - d) Menyusun kebutuhan anggaran kas;
  - e) Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, rencana kerja tahunan;
  - f) Mengkoordinir penyusunan program;
  - g) Menigkoordinasikan implementasi system pengelolaan keuangan dan barang; dan
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
  - a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
  - b) Membuat pertanggungjawaban pengeluaran keuangan.
  - c) Membuat Laporan Keuangan atas penggunaan dana.
  - d) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah.
- 3) Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan perencanaan pemantauan kegiatan.

- b) Menyusun analisa, evaluasi dan laporan terhadap hasil kinerja.
- c) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah.
- d) Mengevaluasi terhadap keberhasilan sistem dan mekanisme.

**c. Bidang Pengelola Keuangan**

Kepala Bidang Pengelola Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- 2) Meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 3) Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bidang Pengelola Keuangan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Anggaran, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
  - b) Menyusun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan anggaran.
  - c) Meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD.
  - d) Menyiapkan dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

- e) Mengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Belanja Daerah, mempunyai tugas :
- a) Meneliti kelengkapan permohonan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh setiap SKPD.
  - b) Mencatat dan membukukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang telah diterbitkan.
  - c) Meneliti Daftar Pembayaran Gaji pada setiap SKPD.
  - d) Menyusun statistik keuangan.
- 3) Sub Bidang Pembayaran, mempunyai tugas :
- a) Meneliti dan mengkoordinasikan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui rekening Koran Bank Pemerintah yang ditunjuk.
  - b) Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - c) Menyiapkan dan menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D.
  - d) Mencatat dan membukukan atas SP2D yang telah diterbitkan dan telah dituangkan.



#### **d. Bidang Pengelolaan Asset dan Akuntansi**

Kepala Bidang Pengelola Asset dan Akuntansi mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan prosedur akuntansi asset meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/digunakan setiap SKPD.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran Daerah.
- 3) Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada setiap SKPD.
- 4) Menyusun Neraca Daerah.
- 5) Menyusun bahan Perhitungan APBD.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bidang Pengelola Asset dan Akuntansi dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Akuntansi, mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran daerah.
  - b) Memeriksa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada setiap SKPD.
  - c) Mempersiapkan penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

- d) Mempersiapkan laporan neraca daerah.
  - e) Mempersiapkan bahan penyusunan Perhitungan APBD.
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Asset, mempunyai tugas:
- a) Menghimpun data, meneliti dan menilai barang-barang milik daerah.
  - b) Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang daerah.
  - c) Menganalisa kebutuhan peralatan/barang daerah.
  - d) Melaksanakan pembukuan atas benda berharga.
  - e) Memeriksa tungkul pemakaian benda berharga.
  - f) Mengelola Sistem Informasi Barang Daerah.
- 3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah.
  - b) Membuat laporan perkembangan pendapatan dan pengeluaran daerah.
  - c) Menyusun laporan evaluasi pendapatan dan pengeluaran daerah.

**e. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penggalian potensi pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 2) Menyusun Rencana Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pusat, Bagi Hasil Provinsi dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- 3) Melaksanakan Evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah.
- 4) Mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bidang Pendataan dan Penetapan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi, mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan pendaftaran dan Pendataan objek/subjek PAD.
  - 2) Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data objek/subjek pajak PAD.
  - 3) Melaksanakan Evaluasi terhadap rencana penerimaan daerah.
- 2) Sub Bidang Penetapan dan Penghitungan PAD, mempunyai tugas :
  - a) Membuat Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - b) Membuat Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
  - 3) Menyampaikan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
  - 4) Menyusun Rencana Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Sub Bidang Penghitungan Bagi Hasil, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun dan menghitung potensi Dana Bagi Hasil Pusat dan Provinsi.
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap rencana penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat dan Dana Bagi Hasil Propinsi.
  - c) Menyusun rencana penerimaan DBH Pusat dan DBH Propinsi.

**f. Bidang Penagihan dan Penertiban**

Kepala Bidang Penagihan dan Penertiban mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pemungutan dan Penagihan pendapatan daerah.
- 2) Melaksanakan pembukuan pendapatan daerah dari objek/subjek pajak.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Propinsi.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan Perda.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bidang Penagihan dan Penertiban dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Penagihan PAD, mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan PAD lainnya yang sah.
  - b) Melaksanakan pencatatan dan pembukuan PAD per wajib pajak dan objek pajak.
  - c) Membuat daftar tunggakan wajib pajak/retribusi daerah.
  - d) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak/retribusi daerah.
  - e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Bank yang ditunjuk atas penerimaan Daerah.
- 2) Sub Bidang Penagihan Bagi Hasil, mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan pemungutan PBB.

- b) Melaksanakan pencatatan dan pembukuan pembayaran PBB per wajib pajak dan per desa/kecamatan.
  - c) Membuat daftar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - d) Melaksanakan koordinasi dengan KP. PBB, Kantor Pelayanan Pajak dan Bank yang ditunjuk atas penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat dan Bagi Hasil Provinsi.
- E Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak PBB.
- 3) Sub Bidang Penertiban, mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan monitoring penyetoran dari pembukuan harian/buku kendali Surat Ketetapan Pajak.
  - b) Membuat Daftar dan Menerbitkan Surat Peringatan/Teguran terhadap WP/WR yang belum melunasi kewajiban setelah jatuh tempo.
  - c) Membuat daftar dan menerbitkan Surat Paksa terhadap WP/WR yang belum melunasi kewajiban setelah jatuh tempo.
  - d) Membuat daftar dan menerbitkan Surat Penyitaan terhadap WP/WR yang belum melunasi hutang pajak setelah jatuh tempo.
  - e) Membuat daftar dan menerbitkan Surat Kesempatan terakhir terhadap WP/WR yang belum melunasi hutang pajaknya setelah jatuh tempo.

- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penertiban dan penegakan Perda.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja ditetapkan oleh Kepala Badan atas persetujuan Bupati.

**B. Deskripsi Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Sumatera selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Data yang digunakan berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

**Tabel IV.1**  
**Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
1	Kab. Lahat
2	Kab. Musi Banyuasin
3	Kab. Musi Rawas
4	Kab. Muara Enim
5	Kab. Ogan Komering Ilir
6	Kab. Ogan Komering Ulu
7	Kota Palembang
8	Kota Prabumulih
9	Kota Pagar Alam
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kab. Banyuasin
12	Kab. Ogan Ilir
13	Kab. Oku Timur
14	Kab. Oku Selatan
15	Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir
16	Kab. Empat Lawang
17	Kab. Musi Rawas Utara

*Sumber: Penulis, 2018*

### **C. Proses Pengujian**

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mentransformasikan data dalam penelitian sebagai gambaran deskripsi pada setiap variabel-variabel penelitian agar lebih mudah dipahami dan dimengerti.

Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 20 dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2****Deskriptif Statistik Variabel Penelitian****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean
Rasio Kemandirian	85	.22	74.96	1331.27	15.6620
PAD	85	1978.00	11238619.00	115968670.00	1364337.2941
DAU	85	.00	12921248.00	407277212.00	4791496.6118
DAK	85	.00	59604080000.00	59738665180.00	702807825.6471
Valid N (listwise)	85				

**Descriptive Statistics**

	Std. Deviation
Rasio Kemandirian	15.97108
PAD	2082600.30194
DAU	3324185.91204
DAK	6464796956.67984
Valid N (listwise)	

Sumber : data yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum 1978,00, nilai maksimum 11238619,00, dan nilai mean 1364337,2941, variabel dana alokasi umum ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 12921248,00, dan nilai mean 4791496,6118, dan variabel dana alokasi khusus ( $X_3$ ) memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 59604080000,00, dan nilai mean 702807825,6471. Variabel tingkat kemandirian keuangan ( $Y$ ) memiliki nilai minimum 0,22, nilai maksimum 74,96, dan nilai mean 15,6620.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi dikatakan baik apabila mampu memberikan estimasi yang tepat atau tidak bias jika lolos serangkaian uji asumsi



klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji apakah variabel yang dioperasikan bebas dari penyimpangan. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterosdistisitas, dan uji autokorelasi.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisi normal *kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak terdistribusi normal.

**Tabel IV.3**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		85
Normal	Mean	0E-7
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	14.28079641
Most Extreme	Absolute	.198
Differences	Positive	.198
	Negative	-.147
Kolmogorov-Smirnov Z		1.828
Asymp. Sig. (2-tailed)		.702

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber : data yang diolah SPSS, 2019*

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,702. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,702 lebih besar dari 0,05, artinya nilai residual berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas berarti antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinieritas. Apabila interpretasi ini dilanggar dengan terjadinya hubungan antar variabel bebas, maka tumbuhlah gejala yang disebut multikolinieritas. Dasar keputusan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas

umumnya adalah dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	
1	(Constant)	20.167	2.794		7.219	.000	
	PAD	3.072E-006	.000	.401	3.791	.000	.884
	DAU	-1.819E-006	.000	-.379	-3.580	.001	.883
	DAK	2.694E-011	.000	.011	.110	.913	.998

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	VIF	
1	(Constant)	
	PAD	1.131
	DAU	1.133
	DAK	1.002

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

*Sumber : data yang diolah SPSS, 2019*

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa variabel PAD ( $X_1$ ) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,884 dan nilai VIF sebesar 1,131, variabel DAU ( $X_2$ ) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,883 dan nilai VIF sebesar 1,133, dan variabel DAK ( $X_3$ ) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,998 dan nilai VIF sebesar

1,002. Dengan demikian, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai VIF di atas 1 dan di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi heteroskedastisitas. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penilaian menggunakan metode *glejser*. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan metode *glejser*. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji metode *glejser* yaitu :

- 1) Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel IV.5**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	14.353	1.679		8.550	.000
1	PAD	2.728E-006	.000	.515	5.603	.000
	DAU	-1.871E-006	.000	-.564	-6.130	.000
	DAK	-1.178E-010	.000	-.069	-.798	.427

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber : data yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel IV.5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi PAD ( $X_1$ ) 0,892, DAU ( $X_2$ ) 0,008, dan DAK ( $X_3$ ) 0,427. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  lebih besar dari 0,05, artinya telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas atau telah lolos uji heteroskedastisitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan uji *Run Test* yaitu :

- c) Jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- d) Jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelas.

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-2.02012
Cases < Test Value	42
Cases >= Test Value	43
Total Cases	85
Number of Runs	24
Z	-4.255
Asymp. Sig. (2-tailed)	.650

a. Median

*Sumber : data yang diolah SPSS, 2019*

Berdasarkan tabel IV.6 diketahui nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,650, yang artinya nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 0,650 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Formulasi regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Adapun hasil uji regresi berganda menggunakan program SPSS versi 20 dapat dilihat pada Tabel IV.7 sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	20.167	2.794		7.219	.000
	PAD	3.072E-006	.000	.401	3.791	.000
	DAU	-1.819E-006	.000	-.379	-3.580	.001
	DAK	2.694E-011	.000	.011	.110	.913

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

*Sumber : data yang diolah SPSS, 2019*

Hasil regresi linear berganda pada variabel PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ) terhadap Rasio Kemandirian ( $Y$ ) dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 20,167 + 3,072b_1 - 1,819b_2 + 2,694b_3 + 0,05$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas menggambarkan bahwa :

- a. Koefisien konstanta sebesar 20,167 artinya apabila pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus nilainya 0 atau tetap, maka tingkat kemandirian keuangan ( $Y$ ) sebesar 20,167.

- b. Koefisien variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,072, artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemandirian keuangan akan meningkat sebesar 3,072.
- c. Koefisien variabel dana alokasi umum sebesar -1,819, artinya apabila dana alokasi umum menurun sebesar 1 satuan, maka tingkat kemandirian keuangan menurun sebesar -1,819.
- d. Koefisien variabel dana alokasi khusus sebesar 2,694, artinya apabila dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemandirian keuangan meningkat sebesar 2,694.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK, terhadap variabel Tingkat Kemandirian Keuangan dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut ini

**Tabel IV.8**  
**Hasil Koefisien Determinan**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 <sup>a</sup>	.200	.171	14.543	1.806

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

*Sumber : data yang diolah SPSS, 2019*

Tabel IV.8 menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut



koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,171 , yang mengandung pengertian bahwa besarnya pengaruh variabel-variabel bebas PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel terikat tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah 17,1%, sedangkan sisanya 87,9% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**b. Uji Hipotesis Secar Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menjelaskan apakah seluruh variabel bebas PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu Tingkat Kemandirian keuangan.

Bentuk pengujiannya adalah :

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017.

Ha : Terdapat pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017.

Kriteria pengambilan keputusan :

$F_{hitung} \geq F_{tabel}$  artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

$F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima

Hasil uji F penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.9 sebagai berikut :

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4295.282	3	1431.761	6.770	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	17131.056	81	211.495		
Total	21426.339	84			

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

*Sumber : data yang diolah SPSS, 2019*

Pengujian secara simultan pada Tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai F untuk model regresi atau  $F_{hitung}$  adalah 6,770 sedangkan untuk nilai  $F_{tabel}$  statistik pada signifikan 0,05  $df_1 = k-1$  atau 3-1 dan  $df_2 = n-k-1$  atau 85-3-1 = 81 adalah 2,72. Untuk nilai signifikan diperoleh sebesar 0,000 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $F_{hitung} >$  nilai  $F_{tabel}$  (6,770 > 2,72) dan nilai Sig. penelitian < nilai  $\alpha$  (0,000 < 0,05). Artinya, terdapat pengaruh positif PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017 atau hipotesis  $H_a$  terbukti.

**c. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)**

Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas PAD, DAU, dan DAK secara parsial/individual terhadap variabel terikat tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bentuk pengujiannya adalah :

Ho<sub>1</sub> : Tidak terdapat pengaruh positif PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

Ho<sub>2</sub> : Tidak terdapat pengaruh positif DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

Ha<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

Ho<sub>3</sub> : Tidak terdapat pengaruh positif DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

Ha<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

Hasil Uji-t dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel IV.10 sebagai berikut:

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	20.167	2.794		7.219	.000
	PAD	3.072E-006	.000	.401	3.791	.000
	DAU	-1.819E-006	.000	-.379	-3.580	.001
	DAK	2.694E-011	.000	.011	.110	.913

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

Sumber : data yang diolah SPSS, 2019

Tabel IV.10 menjelaskan nilai-nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel PAD, DAU, DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai  $t_{hitung}$  PAD sebesar 3,791 dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 dengan  $df = n-k$  atau  $85-3 = 82$  adalah 1,66365. Nilai sig. Penelitian adalah 0,000 dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} >$  nilai  $t_{tabel}$  ( $3,791 > 1,66365$ ) dan nilai Sig.

penelitian  $<$  nilai  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Artinya, terdapat pengaruh positif PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan atau hipotesis  $H_{a1}$  terbukti.

- 2) Nilai  $t_{hitung}$  DAU sebesar  $-3,580$  dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan  $0,05$  dengan  $df = n-k$  atau  $85-3 = 82$  adalah  $1,66365$ . Nilai sig. Penelitian adalah  $0,645$  dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$  ( $-3,580 < 1,66365$ ) dan nilai Sig. penelitian  $>$  nilai  $\alpha$  ( $0,645 > 0,05$ ). Artinya, variabel DAU tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan atau hipotesis  $H_{a2}$  tidak terbukti.
- 3) Nilai  $t_{hitung}$  DAK sebesar  $0,110$  dan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan  $0,05$  dengan  $df = n-k$  atau  $85-3 = 82$  adalah  $1,663865$ . Nilai sig. Penelitian adalah  $0,848$  dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Jadi nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$  ( $0,110 < 1,663865$ ) dan nilai Sig. penelitian  $>$  nilai  $\alpha$  ( $0,848 > 0,05$ ). Artinya, tidak terdapat pengaruh positif DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan atau hipotesis  $H_{a3}$  tidak terbukti.

Dengan demikian, secara parsial variabel DAU dan DAK yang tidak berpengaruh, sedangkan variabel PAD berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2013-2017.

## **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh PAD Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif PAD terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$  dan nilai Sig. penelitian  $< \text{nilai } \alpha$ . Signifikannya variabel pendapatan asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan peningkatan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dari tahun 2013 ke tahun 2017 yang terjadi pada Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Kemering Ilir, Ogan Komering ulu, Pagar Alam, Lubuk Lingkau, Banyuasin, Oku Selatan, Empat Lawang, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang II. Tetapi ada juga Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan asli daerah meningkat akan tetapi tingkat kemandirian keuangan daerahnya mengalami penurunan, diantaranya adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Oku Timur, dan Kabupaten Musi rawas Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reza (2013), Ernawati dan Ikhsan (2017), Renny (2013), Leny (2015), Dian dkk (2016) dan Anita (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah positif dan signifikan mempengaruhi tingkat

kemandirian keuangan. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **2. Pengaruh DAU Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tidak signifikannya dana alokasi umum mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan dikarenakan dana alokasi umum tidak memiliki peranan penting dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Sebab hal utama yang sangat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah, sementara dana alokasi umum serta bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung. Meskipun mayoritas Kabupaten/Kota memiliki dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang meningkat dan tingkat kemandiriannya menuun, akan tetapi dana alokasi umum tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dikarenakan hanya bersifat pendukung. Kabupaten/Kota yang memiliki dana alokasi umum yang meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerahnya mengalami penurunan diantaranya adalah Kabupaten Musi Banyuasi, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Palembang,

Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Empat Lawang, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2016) dan Dian dkk (2016) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh positif DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan



prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013) dan Dian dkk (2016) yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tahun yang memiliki dana alokasi umum meningkat dan tingkat kemandirian keuangannya mengalami penurunan adalah tahun 2015 ke tahun 2016.

#### **4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari hasil uji F, yang menunjukkan Nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan nilai  $F_{tabel}$  dengan signifikan F lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar signifikan  $\alpha$ . Lain halnya yang terjadi pada hasil penelitian pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari uji F yang menunjukkan Nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan nilai  $F_{tabel}$  dengan signifikan F lebih besar dibandingkan dengan nilai standar signifikan  $\alpha$ .

Nilai *adjusted R square* pada hasil uji koefisien determinasi, dapat diartikan bahwa 17,1%% hanya variabel pendapatan asli daerah yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Sisanya 83,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Factor lain tersebut dapat saja berupa dana bagi hasil dan belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dan Maria (2016) dan dian dkk (2016) yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2013-2017.
2. Tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2013-2017.
3. Tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2013-2017.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan lebih menggali lagi potensi sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat dinaikkan jumlah pendapatan

asli daerah. Dengan demikian pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

## **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah misalnya dana bagi hasil dan belanja modal. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode waktu yang digunakan dalam penelitian.